



DISKUSI KPPN DPP PAN SERTIFIKASI TANAH: MANIPULASI ATAU REFORMASI AGRARIA?

Rabu 22 Maret 2018 Pukul 17.00 - 19.00 WIB



SERTIFIKASI TANAH Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin, Anggota Komnas HAM Periode 2012-2017 Prof Hafid Abbas, moderator Yasmin Muntaz, Aktivistis Syahganda Nainggolan, Anggota PAN DPR RI Muhammad Hatta (kiiri ke kanan) dalam diskusi KPPN DPP PAN di Jakarta, Selasa (21/3). Diskusi ini membahas tentang sertifikasi tanah dengan mengambil tema "Sertifikasi Tanah: Manipulasi atau Reformasi Agraria".

● DESSY SUCIATI SAPUTRI

Istana menegaskan, pernyataan Luhut tak mewakili Presiden.

PURWAKARTA — Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta mantan ketua MPR Amien Rais dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berdamai. Ia berharap kedua tokoh negara tersebut segera menyelesaikan polemik di antara mereka secara keluhargaan.

"Kedua-duanya ini adalah sahabat saya. Saya berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan baik," kata SBY, Rabu (21/3).

SBY mengatakan, kritik untuk pemerintah merupakan hal yang wajar dan masyarakat diperbolehkan melukukannya asalkan bukan sesuatu yang bersifat fitnah. Sementara itu, ia meminta agar pemerintah tidak cepat marah apabila mendapatkan kritik.

"Itu tak boleh dihalang-halangi. Hak rakyat untuk mengkritik pemerintahnya jika dianggap belum men-

jalankan tugas dengan benar. Pemerintah tak boleh alergi dengan hal ini," kata SBY menerangkan.

Selama 10 tahun menjabat presiden, kata SBY, dirinya sering mendapatkan kritikan yang jauh lebih keras dari saat ini. Meski begitu, pemerintahannya tak jatuh di tengah jalan. Ia meletakkan jabatan tepat pada waktunya. "Namun, entah kenapa yang dulu keras mengkritik saya itu malah sekarang lebih banyak diam," ujar Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

Sebelumnya, Amien Rais melontarkan kritik kepada pemerintah yang berkuasa saat ini. Ketua Majelis Kehormatan PAN ini mengatakan, ada pembohongan dalam program pembagian sertifikat tanah karena ia menilai sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai kelompok tertentu.

Selanjutnya, Luhut kemudian menanggapi kritikan tersebut dengan mengatakan program sertifikat tanah harus terus berjalan. Ia membantah pernyataan Amien yang menyatakan program tersebut membohongi masyarakat. Bahkan, Luhut terkesan mengancam Amien dengan mengaku akan membuka "dosa-dosa masa lalu" Amien.

Staf Khusus Presiden Bidang Ko-

munikasi Johan Budi pun menegaskan, pernyataan Menko Kemaritiman Luhut tak mewakili sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi). "(Pernyataan) Pak Luhut, menurut saya, tidak mewakili sikap Presiden. Ini perlu digarisbawahi," ujar Johan.

Johan mengatakan, pernyataan Luhut merupakan sikap pribadinya dan bukan mencerminkan sikap pemerintah. "Tidak mencerminkan sikap Presiden atau sikap pemerintah. Itu lebih kepada sikap pribadi Pak Luhut yang gaya penyampaiannya seperti itu," ujarnya lagi.

Bantahan menteri

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil membantah pernyataan Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais yang menyebut program pembagian sertifikat tanah merupakan pengibulan yang dilakukan oleh pemerintah. Ia menyebut program pemerintah untuk membagikan sertifikat hak atas tanah tersebut dilakukan agar masyarakat memiliki aset hidup.

"Ada teori yang disebut atau dibuat oleh Hernando de Soto, ekonom dari Peru. Dia mengatakan, tanah yang tidak punya sertifikat itu adalah aset yang *idle*. Tetapi, begitu

tanah itu diberikan sertifikat, menjadi lebih aset, aset yang hidup. Itu yang kita inginkan. Bagaimana dia bilang kubil?" kata Sofyan.

Pemerintah berharap, dengan memiliki aset tanah yang sudah memiliki sertifikat, masyarakat dapat memjaminkan asetnya ke perbankan. Sebab, kata Sofyan, masyarakat yang tak memiliki sertifikat tanah selama ini merasa kesulitan mendapatkan pinjaman finansial dari perbankan.

"Dengan begitu, kita sertifikatkan. Mereka itu punya tanah, entah tanahnya 50 meter, entah 100-200 meter atau berapa pun, mereka perlu modal, tinggal pergi ke bank atau ke pegadaian, kemudian memjaminkan sertifikat tersebut," ujarnya.

Ia pun meminta Amien Rais dapat ikut terjun ke lapangan melihat respons masyarakat penerima sertifikat hak atas tanah tersebut. Dengan begitu, lanjutnya, Amien Rais tak akan mengatakan pemerintah telah melakukan pembohongan.

"Oleh sebab itu, kalau misalnya Pak Amien Rais lihat bagaimana penyerahan sertifikat tanah (membuat) rakyat begitu gembiranya, pasti Pak Amien Rais mengatakan bahwa itu pengibulan *enggak* ada," ucap Sofyan.

■ inas widyanuratikah ed: muhammad hafid

Terbukanya Fakta Reformasi Agraria'

● AMRI AMRULLAH

JAKARTA — Perdebatan antara Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan mantan ketua MPR Amien Rais soal pembagian sertifikat tanah yang dianggap sebagai pengibulan dinilai membuka fakta persoalan reformasi agraria selama ini.

Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin menegaskan, yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan membagi-bagikan sertifikat bukan reformasi agraria. Sebab, reformasi agraria adalah pembagian tanah atau distribusi ulang lahan pertanian.

"Reforma agraria itu adalah distribusi lahan ke rakyat, dan pemberian sertifikasi tanahnya di belakang," kata Iwan Nurdin dalam diskusi Sertifikasi Tanah: Manipulasi atau Reformasi Agraria?, Rabu (21/3).

Iwan mengatakan, cara pembagian sertifikat tanah oleh Jokowi itu tidak bisa dikatakan reformasi agraria. Itu pun tidak sesuai dengan yang dikampanyekan dalam Nawacita kelima Jokowi.

Ada yang mengatakan, pembagian sertifikat tanah adalah bagian kecil dari reformasi agraria. Namun, ia mengatakan, pemerintah Jokowi menjalankan reformasi agraria dengan kadar yang sangat sedikit. Sebab, sangat sedikit sekali tanah dari sertifikat yang dibagikan itu bagian dari redistribusi lahan. "Rakyat yang mendapatkan pembagian sertifikat tanah itu hanya remah-remah sisa dari tanah jutaan hektare yang dikuasai oleh perusahaan besar," Iwan menegaskan.

Kalaupun alasan pengurusan sertifikat tanah sulit sehingga perlu dipermudah, menurut dia, hal itu bagian dari pelayanan birokrasi masuknya reformasi birokrasi, bukan reformasi agraria. Di satu sisi, selalu ada ketidakcakapan menteri agraria yang sering kali membuat kebijakan reformasi agraria terhambat.

Akhirnya memberikan izin kepemilikan lahan jutaan hektar dengan sangat gampang kepada pengusaha dan perusahaan besar, sedangkan banyak rakyat-rakyat di desa-desa yang berada di kawasan hutan sangat mudah diancam diusir ketika perusahaan perkebunan dan pertambangan masuk.

"Tetapi, ketika rakyat ingin mengklaim tanahnya malah ditanya sertifikatnya mana. Padahal, seharusnya jika perusahaan perkebunan dan pertambangan yang mengambil lahan dengan restu BPN, BPN-nyalah yang harus dibui, tapi ini tidak. Rakyatnya yang diminta ketat mana sertifikat kepemilikannya, tapi perusahaan besar tidak," paparnya. ■ ed: muhammad hafil